
Menguatnya Sakralitas-Nasionalisme Papua dalam Fenomena Kekerasan

Fred Keith Hutubessy
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yapis Papua, Indonesia
fredkeith12@gmail.com

How to cite (in APA style):

Hutubessy, F. K. (2017). Menguatnya Sakralitas-Nasionalisme Papua dalam Fenomena Kekerasan. *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 8(2), pp.69-77. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.8.2.1057.69-77>

Abstract

This paper discusses about violent phenomenon that has been going for a quite long time among the Papuans in the socio-political movements of the Republic of Indonesia (NKRI). The violence is an attempt to stifle separatist action, according to the government. However, the efforts government made is always repressive and ends with violence. On the other hand, the role of government and media has become a stimulus for the society to make a stigma and stereotypes toward the Papuans. Moreover, there are racial acts toward the Papuans that is done by unscrupulous party in the public sphere. The method used in this research is descriptive qualitative methods and the data used is obtained from observation, interview, and literature study. The analysis of this study has found the fact that actions that has been done and ends with violence is because of the feeling of being different and also physical violence, racism, and stigmatization toward the Papuans. This process eventually forms a violence cycle of the feeling of being different.

Keywords: Conflict; Nationalism; Sacred

I. PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia baik sebagai pelaku, maupun sebagai korban. Secara singkat, studi dalam tulisan ini memfokuskan kepada fenomena kekerasan yang secara langsung telah menjadi bagian dalam kehidupan orang Papua, di tengah situasi dan pergerakan kehidupan sosial-politik Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tulisan ini juga mengajak nalar berpikir pembaca untuk menalar melalui suguhan pengalaman reflektif korban-korban kekerasan.

Peristiwa Biak berdarah, 6 Juli 1998 menjadi salah satu dari sekian catatan kelam sejarah hidup orang Papua. Eben Kirskey, Antropolog dari *University of New South Wales* dalam kesaksiannya sebagai saksi dalam kasus “Biak Berdarah” pada pengadilan warga di pusat studi perdamaian dan konflik *University of Sydney* (Jubi, 2013):

Seperti orang yang sedang bernyanyi, pasukan mulai menembak ke kerumunan. Orang-orang mulai berjatuh dan sebagian lainnya berlarian. Orang-orang yang selamat digiring ke pelabuhan dan dinaikkan di kapal-kapal. Mereka bisa melihat orang mati dan sekarat karena tembakan aparat sedang dimuat ke truk. Wanita diperkosa dan dimutilasi setelah melihat teman mereka dipenggal.

Tinneke Rumkabu dan juga Yuda Korwa menjelaskan proses penyiksaan yang dilakukan terhadap teman mereka (Jubi, 2013):

“Dia dibakar, dia dimutilasi–dipotong kelaminnya–diperkosa, diperlakukan dengan cara yang paling brutal dan oleh polisi Indonesia, Kami ingin orang-orang yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan. Kami ingin penyelidikan, kami ingin penuntutan pidana dan kami ingin pemerintah untuk membayar kompensasi atas apa yang mereka lakukan kepada orang-orang di Biak saat itu.”

Peristiwa-peristiwa ini dikatakan sebagai Fenomena kekerasan. Johan Galtung (Galtung, *The True World's: A Transnational Perspective*, 1980) menjelaskan bahwa fenomena kekerasan disebabkan oleh “*any avoidable impediment to self-realization*” atau kecenderungan dari sesuatu yang menghalang individu atau kelompok untuk merealisasi dirinya. Sementara itu, (Gurr, 2016) dalam pandangannya juga menjelaskan tentang penyebab konflik kekerasan. Ia menegaskan bahwa konflik kekerasan bermula dari sebuah deprivasi relative atau ketidakpuasan dan ketimpangan terhadap harapan yang berada dalam hidupnya.

Padahal salah satunya dalam konteks Papua, menurut (Wonda, 2007) salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan POLRI kepada rakyat Papua berkaitan dengan isu separatis, melakukan tindakan makar dan juga upaya melawan konspirasi kapitalisme dunia (Paharizal & Ismantoro Dwi Yuwono, 2016) yang berupa hasil produk geopolitik dunia (Benny Giay dan Yafet Kambai, 2003). Permasalahan ini kemudian dalam perkembangannya hingga saat ini telah didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya (Suryawan, 2017) yang meneliti tentang Papua vs Papua menemukan bahwa upaya investor yang merebut lahan secara sepihak dan pemekaran menjadi bagian penting faktor kekerasan. Dampak dari pada berbagai bentuk kekerasan mengakibatkan *traumatic* yang berlebihan (Yoman S. S., 2007).

Oleh karenanya dalam konteks kekerasan terhadap rakyat Papua harus dipandang sebagai fokus yang utama untuk menemukan permasalahan ini tanpa memungkiri hasil-hasil penelitian sebelumnya. Alasan penelitian-penelitian sebelumnya (Wonda, 2007; Paharizal & Ismantoro Dwi Yuwono, 2016; Benny Giay & Yafet Kambai, 2003; Suryawan, 2017; Yoman, 2007) terkait kekerasan di Papua sejauh yang diketahui hanya membahas dari aspek kepentingan akan perebutan sumber daya yang berujung kepada ketimpangan dan gambaran kekerasan yang selama ini terjadi.

Sementara itu, kajian yang mengedepankan aspek ekspresi dari perasaan berbeda berujung kepada berbagai bentuk kekerasan dan belum dikaji secara mendalam sebagai bagian yang integral dalam pengembangannya. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara ekspresi dari perasaan berbeda dengan berbagai bentuk konflik kekerasan pada rakyat Papua. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara ekspresi perasaan berbeda dan berbagai bentuk konflik kekerasan kepada rakyat Papua dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang dikembangkan dalam unit analisis dari data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka yang akan bermanfaat secara teoritis untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji tentang bentuk kekerasan khususnya di Papua.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Papua; Bayang-bayang Sejarah Kekerasan

“Biak berdarah” di tahun 1998 menjadi *memoria passionis* bagi masyarakat Papua khususnya di Biak pada saat itu. Sekilas tentang peristiwa ini, Filep Karma (Karma, Seakan Kitorang Setengah Binatang, 2014) menjelaskan, motif yang mendasari peristiwa ini ia lakukan dengan mengibarkan bendera bintang kejora, 2 Juli 1998 di tower air dekat puskesmas di Biak. Sekedar mengingat kembali, setelah kejatuhan Soeharto yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru, terjadi beberapa peristiwa demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Irian Jaya (Papua). Di Biak, masyarakat memutuskan untuk melakukan perlawanan atas dasar ketidakadilan secara sosial, ekonomi, dan politik. Mereka memutuskan secara sepihak untuk bergabung dengan pola perjuangan lama yang mengedepankan aspek kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga masyarakat yang datang dengan membawa parang, tombak, *dopis* (bom ikan) dan lain-lain. Ketika melihat situasi ini, Karma sebagai kordinator aksi mengumpulkan mereka, memberikan pemahaman:

Ini adalah perjuangan damai, senjata kita adalah Injil. Di Indonesia, hukum mengizinkan aparat keamanan menembak, jika orang yang hendak ditangkap membawa senjata. Namun, kalau kita bersenjatakan kitab suci, tidak ada alasan mereka untuk menangkap kita. Kalaupun polisi datang menangkap kita, tidak harus melarikan diri. Kita tetap ditempat bukan berarti kita menyerah. Kita menunjukkan bahwa kita adalah ksatria, kita berani kita hadapi!. Kita harus berhadapan muka dengan dorang untuk sampaikan kita punya pendapat.

Kemudian ia menyuruh adiknya mengumpulkan semua benda-benda tersebut dan membawanya ke laut dekat pelabuhan Biak untuk dimusnahkan.

Ketika pengibaran sedang berlangsung, beberapa tokoh masyarakat dan juga tokoh agama membujuknya untuk menyerah. Mereka mengatakan: “*anak menyerah saja, kami jamin anak punya keselamatan*”. Namun ia kemudian menjawab sambil tertawa “*pantang bagi sa untuk menyerah, teman ko percaya janji pejabat Indonesia?*”. Karma pun mencoba memberikan alasan dengan membandingkan beberapa tokoh yang meninggal akibat dari janji. “*Lihatlah Soekarno yang telah berjasa besar bagi negara Indonesia, namun ketika ditahan di rumah, ia meninggal secara perlahan-lahan. Begitupun dengan Ferry Awom yang menyerahkan diri dengan pasukannya, namun sampai*

sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Ia mengatakan, lebih baik ia ditembak mati daripada menyerah baik-baik kemudian diculik, lebih baik mati dengan terhormat!” (Karma, Seakan Kitorang Setengah Binatang, 2014).

Satu ucapan Karma untuk memancing kesadaran masyarakat Biak saat itu dengan menghimbau semua orang yang berada dibawah tower air ketika proses pengibaran bendera. Ia mengatakan:

Bagi yang sudah siap mati sebagai pahlawan, silahkan tinggal dan bergabung dengan saya dibawah tower air ini, tetap yang masih ragu-ragu dan ingin hidup, dan belum kuat imannya, silahkan pulang ke rumah. Maksudnya ialah pulang, kunci pintu dan berdoa kepada kami yang sudah siap mati untuk Papua merdeka. Jangan kalian hanya menyingkir dari tower ini dan jadi penonton waktu kami ditangkap dan di eksekusi. Tidak pernah saya menutupi informasi, saya tahu rencana besar mereka ditanggal 6 juli 1998 ini, akan ada operasi militer besar-besaran dan kami akan ditumpas habis. Saya tidak mau dikemudian hari orang bilang saya hanya datang untuk tipu-tipu rakyat Papua untuk mati dan saya cari selamat sendiri. Kalau nantinya saya masih hidup, itu karena Tuhan. Karena hidup dan mati saya ada ditanganNya.

Latar belakang perjuangan Biak berdarah di tahun 1998, sebenarnya merupakan buntut panjang dari represi (kekerasan) negara yang dilakukan oleh negara di tahun 1960 sampai dengan tahun 1980an dengan mengatasnamakan DOM (Daerah Operasi Militer). Masyarakat di kampung-kampung banyak yang dibunuh, diculik, ibu-ibu dan anak gadis remaja diperkosa. Karma (Karma, Seakan Kitorang Setengah Binatang, 2014) mengatakan, sampai saat ini di Biak Barat, terdapat anak hasil korban pemerkosaan dengan wajah bukan orang asli Biak, namun perawakannya mirip dengan orang dari luar Papua (Karma, Biak Berdarah, 2015).

Peristiwa ini menurutnya adalah sebagai sebuah pembuktian bahwa Papua ingin merdeka. Keinginannya untuk merdeka dilakukannyadengan mengibarkan bendera bintang kejora sebagai lambang kebesaran yang yakininya. Ia mengingat sebuah teori yang mengatakakan bahwa, apabila sebuah bangsa yang ingin merdeka harus mengibarkan bendera selama 24 jam dan tidak boleh diturunkan. Setelah adanya pengakuan dari PBB terhadap peristiwa ini, maka bangsa itu harus dimerdekakan. Namun ia mengatakan: *“teori yang saya hendak buktikan itu tidak benar dan saya sudah membuktikannya”*. Apa yang dikatakan olehnya bahwa pada tanggal 6 Juli 1998 akan terjadi penyerangan besar-besaran untuk menurunkan bendera Bintang Kejora akhirnya terbukti (Karma, Biak Berdarah, 2015).

Menurut laporan *Human Rights Watch* dalam (Karma, Seakan Kitorang Setengah Binatang, 2014), saat itu salah seorang sersan polisi masuk dan hendak memprovokasi massa. Ia kemudian dipukul oleh massa dan akhirnya menciptakan bentrok yang lebih besar dan berujung kepada penembakan yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyaknya orang yang mati tertembak dan tergeletak. Kemudian mayat mereka di angkut dengan truk dan dibuang ke dalam laut oleh dua kapal TNI angkatan laut.

Paulus Kafiar salah seorang yang berada di tempat kejadian menceritakan:

Saat itu peristiwa “Biak Berdarah” pada tanggal 6 Juli 1998, peristiwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Aparat Keamanan RI pada waktu itu berlapis-lapis dengan kekuatannya mengepung keadaan Kota Biak. Rumah masyarakat pada waktu ditembak, pengebrekan dari rumah-ke rumah. Penyiksaan masal pun dilakukan aparat kepada masyarakat yang keluar dari rumah mereka. Pada waktu itu saya menyaksikan betapa kejamnya aparat keamanan kepada masyarakat, Massa yang berkumpul dibawah Tower itu digiring ke Halaman Pelabuhan Laut Biak untuk disiksa, Agus Sada dipukul dengan balok 5x5 dan dihukum berjalan dengan dada. Martinus Ronsumbre dipukul dengan kopor senjata, Elly Ansek ditampak diperutnya. Masa yang digiring ke halaman pelabuhan itu dibuang ke dalam truk-truk aparat dan diambil ke kantor polisi. Di kantor polisi kami dibagi menjadi dua bagian yaitu kelompok yang terlibat langsung dan kelompok yang tidak terlibat langsung. Para pemilik toko yang sempat memberi air minum pada masyarakat pada waktu itu turut disiksa oleh aparat keamanan seperti yang dialami oleh toko Sami-sami. Semua anak-anak Papua yang terlibat langsung pada kegiatan di bawah Tower itu ditahan dan diproses ke pengadilan. Sejak kami dalam tahan berbagai tindakan yang tidak manusiawi dilakukan pada kami. Sejumlah saksi-saksi yang dikirim ke pengadilan di ancaman oleh aparat untuk menyangkal, sehingga pengadilan dapat memberikan vonis hukum pada para demonstran. Saya ditekan oleh aparat untuk menyangkal tindakan kekerasan aparat kepada masyarakat.

Akwila Wabiser juga menjelaskan:

Saya pada waktu itu berdiri sangat dekat dengan Komandan TNI AL Biak, saya secara langsung melihat dan mendengar bagaimana Komandan TNI AL Biak memberikan perintah untuk membubarkan masa. Dengan dikeluarkan perintah tersebut aparat TNI mulai memblokir semua lokasi Tower. Yang namanya pembubaran paksa massa yang dilakukan oleh aparat keamanan itu sangat tidak manusiawi. Hal ini membuat bentrok antara para demonstrasi dan aparat keamanan. Dengan tindakan yang diambil oleh aparat ini untuk membubarkan massa pada waktu itu membuat banyak orang Papua (Biak) disiksa, dan ditembak agar bisa bubar. Masyarakat yang berkumpul pada lokasi tower itu terjepit oleh blokade aparat keamanan hal ini membuat masyarakat juga berusaha untuk melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan aparat pada waktu tidak saja di lokasi Tower tetapi tindakan aparat ini meluas sampai ke pedesaan. Hal ini masyarakat tidak dapat bebas untuk berpergian.

Sebuah informasi juga didapatkan dari salah seorang warga sipil yang menceritakan bahwa penyisiran dilakukan sampai ke rumah-rumah penduduk:

Kitong (kita) saat itu dirumah saja dan pintu kunci. Rumah-rumah di kota milik semua orang Papua tanpa terkecuali diperiksa tentara. Rumah mereka diperiksa sampai ke kolong-kolong tempat tidur buat cari yang kibarkan bendera.

Pada peristiwa itu, Filep Karma mendapatkan tembakan pada kedua kakinya, kemudian ditangkap dan dipenjarakan bersama dengan kedua saudaranya, Constan dan Sari Karma (Karma, Seakan Kitorang Setengah Binatang, 2014).

Di dalam aksi massa pasti akan berkaitan dengan sebuah situasi tertentu. Pada kasus ini, aksi massa disebabkan oleh sebuah upaya untuk melampaui apa yang berada di luarnya selama ini. Faktor-faktor seperti, sejarah yang berbeda antara Papua dengan Indonesia (Chauvel, 2005; Singh, 2008), dan proses kekerasan ketika bergabung dan setelah dengan Indonesia di tahun 1969 (Osborne, 2001; Yoman, 2007; Suryawan 2013) menjadi dasar dalam melakukan perjuangan untuk mendapatkan persamaan hak yang selama ini belum didapatkan. Kecenderungan dari sejumlah aksi massa tentang Papua sering dianggap sebagai tindakan separatis. Apalagi ketika melihat bendera bintang kejora yang digunakan dalam aksi tersebut pastinya akan hubungkan pemerintah dalam hal ini aparat keamanan sebagai lambang sebuah negara, sehingga tindakan yang dilakukan dalam ranah preventif selalu berakhir dengan represif. Di dalam posisi ini, stigma dan *stereotype* tampak terbuka di ranah publik di Papua maupun di luar Papua.

Rasialisme: Stigma dan Stereotype Separatis

“Sleman Damai Tanpa Separatis”

Tulisan dalam spanduk iniditemukan oleh penulis sedang terpasang tepat di belakang sebuah kampus di jalan Seturan, Yogyakarta. Spanduk ini terpasang tanggal 30 November 2015. Kota Yogyakarta memang dikenal sebagai kota pelajar, tempat berkumpulnya seluruh mahasiswa baik dari dalam maupun dari luar Jawa. Apakah ada tindakan separatis di Yogyakarta yang dilakukan oleh kelompok tertentu? Jika merujuk kepada pandangan perihal gerakan yang dianggap separatis di Indonesia menurut pandangan secara umum, pastilah akan berkaitan dengan beberapa provinsi yang telah di stigma separatis oleh pemerintah dan telah di ketahui bersama seperti Papua, Maluku, dan Aceh.

Selanjutnya setelah spanduk itu terpasang, penulis menemukan jawaban tentang apa sebab spanduk ini dipasang. Menurut cerita dari salah seorang sumber NB salah seorang mahasiswa Papua di Yogyakarta, pada malam hari tepat di mana spanduk terpasang, aparat kepolisian dengan beberapa pasukan bersenjata lengkap mendatangi asrama mahasiswa Papua “*Kamasan*” untuk menggeledah asrama. NB bercerita, ada beberapa polisi yang masuk dan merobek *Styrofoam* bermotif bendera bintang kejora di depan dinding asrama. Polisi juga menggedor-gedor pintu dan memaksa masuk. Merujuk kepada peristiwa ini, argumentasi sementara menunjukkan bahwa tindakan pemasangan spanduk ini ternyata ditujukan kepada mahasiswa Papua yang sedang berkuliah di kota Yogyakarta.

Merespon akan kejadian penggeledahan dan pemasangan spanduk ini, IPMAPA (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua) melaporkan tindakan yang telah diketahui dikoordinir oleh Muhammad Suhud S.H, Beserta organisasi dan Saudara Chang Wendryanto S.H. Ketua komisi C DPRD Propinsi D.I.Y dari Fraksi Partai PDIP kepada pihak yang berwajib. Mereka dilaporkan dengan laporan atas siar kebencian sebagai tindak Pidana dan Diskriminasi Rasial yang merupakan

sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 156 juncto Pasal 157 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 juncto Pasal 15 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghentian Diskriminasi Ras dan Etnis. Harapan mereka, para pelaku baik secara individu maupun organisasi wajib diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku demi melindungi Hak Asasi Manusia setiap warga Negara Indonesia sembari mewujudkan prinsip Negara Indonesia yang adalah Negara hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Sebagai *counter* untuk melawan stigma dan stereotipe, para mahasiswa Papua di Yogyakarta membuat spanduk balasan yang bertuliskan “*Kami Mahasiswa Papua, bukan separatis*” dan dipasang di depan asrama Papua “*Kamasan. Mereka juga menggunakan momentum pertandingan sepakbola yang dilakukan oleh Persipura Jayapura di Yogyakarta dengan memasang spanduk dipinggir lapangan, dengan harapan semua orang khususnya warga Yogyakarta dapat membaca sebagai upaya melawan stigmatisasi separatis terhadap diri mereka.*

Bukan hanya sampai di sini saja, fenomena rasialis terus menjamur dan dialami oleh mahasiswa Papua yang sedang berkuliah di luar Papua.

“Kami sering dibilang wong ireng (orang bertubuh hitam), *wong ireng* (Orang bertubuh hitam), pemabuk, pengacau pelanggar aturan lalu lintas, bodoh, berbau badan, monyet, jelek”

Pada kasus Papua, rasialis Indonesia telah masuk dan meracuni sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua. Potret kehidupan dalam contoh di atas dengan jelas menggambarkan bahwa kebudayaan Papua adalah kebudayaan yang tidak beradab dan inilah perilaku dehumanisasi. Misalnya orang menggunakan *koteka* di wilayah pegunungan tengah Papua. Apakah dengan menggunakan *koteka* dapat dikatakan orang tersebut tidak berbudaya? Proses semacam ini telah berlangsung bertahun-tahun lamanya di era Presiden Soeharto dengan memaksakan orang Irian Jaya (Papua) untuk menanggalkan *koteka* dan digantikan dengan celana (Aditjondro, 2000).

Padahal jika dipandang dalam wilayah teritori Indonesia, wilayah Papua masih berada dalam wilayah yang sama dengan masyarakat (oknum) yang melakukan proses dehumanisasi ini. Hal ini secara langsung telah merusak aspek psikologi, aspek politik dan moral individu maupun golongan orang Papua. (Karma, 2015) mengatakan dalam konsep stereotype rasial semacam ini:

“*mindset* orang Jawa khususnya konsep budaya wayang, kami ini disamakan dengan monyet atau raksasa yang besar, bau, terus orang Jawa biasa bilang *gragas* atau rakus. Sebab dipewayangan begitu, jadi *mindset* orang Jawa berkembang begitu. Selama saya kuliah di Jawa, dan saya berobat tahun 2009 ke Jawa, beberapa mahasiswa sempat datang mengunjungisaya, dan mereka katakan”bapa, sampai sekarang kami masih dipanggil monyet”. Terus saya melihat Persipura, saat Jackson Tiago tersinggung pernah dilempari kulit pisang. Setelah itu dia sempat dipanggil untuk melatih Timnas dan ia mengatakan, “sekarang monyet mau mengajar manusia main bola”. Akhirnya kami sampai sekarang ini karena tidak dianggap akhirnya menjadi sasaran tembak dari TNI/POLRI Indonesia”.

Pandangan mengeneralisir yang dilakukan oleh pelaku dalam setiap perjumpaan tentunya terus menimbulkan kebencian dalam diri orang Papua. Praktik-praktik yang kerap terjadi semacam ini mengakibatkan orang Papua memiliki *Sense of Difference* dalam diri mereka, dengan menganggap bangsa Indonesia bukan bagian darinya.

Pola-pola rasialis seperti ini membuat korban kehilangan kepercayaan diri dan mengakibatkan luka batin yang sulit untuk dihilangkan. TW seorang mahasiswa Papua mengatakan: “*Kitong* (kita) *terlalu bodok bagaimanakah sampai dong* (mereka) *anggap kitong* (kita) *seperti ini* (tidak beradab)?”. Beberapa faktor yang menimbulkan kekerasan ini terjadi disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, pergaulan yang terbatas, serta upaya hegemoni oleh masyarakat sekitar. Faktor-faktor ini mempengaruhi pola berpikir seseorang, sehingga pelaku memandang kehidupan dalam hal ini budaya korban tidak lebih baik darinya. Pada perkembangannya akan timbul rasa kebencian dari si korban kepada si pelaku dalam ranah identitas. Misalnya, adanya stigma dan stereotype balasan dan bahkan akan bermuara kepada kontak fisik berupa perkelahian yang juga berujung kepada kekerasan fisik (Galtung, Studi Perdamaian, 2003).

Seorang pemuda asli Papua di salah satu kota di luar Papua bercerita tentang sebuah peristiwa yang pernah dialaminya ketika menjual baju dengan logo bendera bintang kejora. “*kaka, waktu itu ada dua orang yang datang ke kos terus dong cari sa dan suruh sa tidak boleh jual baju ini lagi?*” (kakak, semalam ada dua orang yang datang mencari saya di kos dan melarang saya untuk berjualan baju bintang kejora). Penulis meresponnya dengan bertanya, “*lalu dong buat apa ko? Dong*

larang terus ko masih mau jual?" (apa yang mereka lakukan? Bila mereka melarang apakah kamu masih ingin jual?) ia menjawab, *"tra bikin apa-apa sa kaka, sa tetap jual toh kaka, dong siapa mau larang sa!"* (mereka tidak berbuat apa-apa, saya tetap akan jual, siapa mereka hendak melarang saya).

Tindakan demikian di katakan Socoratez Sofyan Yoman (Yoman S. S., 2015):

"Ini saya mau bilang, nilai-nilai budaya yang positif seperti itu, bangsa kolonial selalu melihat itu adalah ancaman bagi dia dan dia harus hancurkan itu. Nilai-nilai budaya harus dihancurkan secara sistematis. Ini tidak baik, dan sekarang dia tidak bisa eliminer dengan kata itu, dan ini dikatakan mereka simbol perlawanan. Sebenarnya kalau dia mau hancurkan saja bisa, tetapi pasti nanti orang berpandangan kenapa *you* hancurkan budaya saya? Nilai-nilai hidup yang leluhur kasih buat saya. Akhirnya dia katakan, *aaah, ini simbol kedaulatan*".

Pandangan Yoman ini dapat di pandang dari beberapa sisi seperti peran perlawanan yang dimaksudkannya lebih dikhususkan kepada aspek kemanusiaan yang dimiliki masyarakat Papua jikadi pandang dari perannya sebagai tokoh agama untuk memperjuangkan keadilan bagi warga jemaatnya. Sedangkan dari sisinya sebagai masyarakat, pemaknaan di atas juga dapat bermakna politis tentunya. Oleh karenanya, hal ini menghasilkan tindakan penghancuran secara sistematis, namun dari aspek pergerakan ini merupakan wujud dari tindakan yang konkrit untuk terbebas dari kekerasan secara struktur, psikis maupun fisik dalam makna perjuangan mereka atas dasar ekspresi perbedaan identitas.

Apabila mengkaji pola kekerasan model ini menurut (Galtung, Studi Perdamaian, 2003) maka contoh kasus di atas merupakan bentuk kekerasan kultural/symbolik. Kekerasan model ini dilakukan dengan memberikan stereotype atau stigma kepada orang atau kelompok tertentu. Jenis kekerasan ini menurutnya merupakan kekerasan yang cukup serius. Jenis kekerasan ini cukup sulit untuk dilupakan, disebabkan kekerasan ini melibatkan aspek psikologis korban dan juga mengakibatkan korban mengalami penolakan dalam lingkungan atau komunitas yang berbeda dengannya. Secara langsung (Rumansara, 2015) mengatakan bahwa pola stigma dan stereotype ini juga telah terpolakan dalam masyarakat khususnya terhadap Papua. Untuk wilayah Papua terjadi dualisme politik dari masyarakat. Jadi, apabila ada orang Papua atau non Papua yang berbicara untuk membela keadaan yang tertindas, ini dikatakan sebagai sebuah upaya separatis oleh negara.

Kasus Filep Karma mengindikasikan sebagai korban stigma dan stereotype. Mengapa demikian? Media cetak maupun online pada praktiknya kerap kali meliput laporan tentangnya. Pada laporannya, media selalu mengatakan bahwa ia adalah anggota organisasi Papua merdeka. Praktik-praktik semacam ini mengakibatkan pandangan secara rasial tetap terbentuk dalam pengetahuan secara kognitif dan juga secara afektif sebagai stimulus untuk meningkatkan kekerasan secara kultural. Stimulus dalam membentuk stigma dan *stereotype* separatis dapat berkembang dengan tak terbendung, sehingga memunculkan pandangan bahwa seorang Filep Karma adalah anggota separatis karena seriap aksi yang dilakukannya selalu menggunakan bendera bintang kejora yang juga merupakan bendera hasil klaim integral dari organisasi separatis.

Lebih lanjut, pandangan orang awam tentang Filep Karma akan terkoneksi ke dalam bentuk fisik yang dimiliki olehnya, dengan kulit hitam dan rambut keriting, maka terbentuklah pandangan pelaku dari hasil rekonstruksi media dengan cara menggeneralisir bahwa orang dengan fisik seperti itu adalah separatis. (Karma, Biak Berdarah, 2015) berpandangan bahwa perjuangan yang ia lakukan selama ini untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat Papua yang selama ini tidak didapatkannya. Perjuangan yang dilakukannya telah dilandasi dengan damai, tanpa kekerasan, dan murni secara kemanusiaan dan bukannya terkait dengan kepentingan sebuah organisasi tertentu.

Sebagai upaya untuk meredakan stigmatisasi dan *stereotype* rasialis, Herman Saud mengatakan: *pemerintah ini seharusnya menghargai rakyatnya dulu lah, itu intinya. Rakyat itu dari sabang sampai merauke bahwa inilah rakyat Indonesia. Pemerintah seharusnya melihat mereka itu adalah warga negara yang harus selalu diperhatikan dan dibangun. Tidak usah curiga terhadap rakyat sendiri. Hilangkan kecurigaan. Walaupun ada yang bersifat menentang, itu ada alat negara, polisi dan tentara, tetapi tidak usah langsung membunuh karena ini rakyat. Mungkin ada hal yang bertentangan ditangkap, adili dengan baik, jika bersalah atau dengan dapat di dengar aspirasinya. Pemerintah juga kalau bersalah dalam aturan harus siap untuk merubah. Tidak bisa dengan bilang saya yang berkuasa jadi saya yang harus buat ini terus menerus. Saya pikir, kenapa ada pemerintah kalau tidak ada rakyat.*

Kekerasan dengan model ini apabila semakin sering terjadi akan menimbulkan perasaan yang berbeda dalam koneksi antara Papua dan Indonesia. Apalagi faktor terbesar dapat terlihat dari berbagai bentuk kekerasan yang telah terjadi sejak bergabung dengan Indonesia di tahun 1969 (Aditjondro, 2000; Osborne, 2001; Suryawan 2013) membuat perasaan berbeda tidak hilang. Koneksi berbeda untuk membentuk negara maupun dalam perbedaan kebudayaan menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk dikaji lebih mendalam. Berbagai upaya selalu digunakan salah satunya dengan menggunakan bendera bintang kejora dalam setiap aksi untuk memperjuangkan keadilan dalam pandangan Nasionalisme Papua. Untuk itu akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

Interkoneksi Kekerasan dan Perasaan Berbeda

Kasus Papua dalam interkoneksi antara perasaan berbeda dan fenomena kekerasan akan lebih mendalam jika di kaji dalam ruang lingkup sejarah untuk menemukan semangat Nasionalismenya. Penelitian yang dikembangkan sebelumnya oleh (Singh, 2008) dan (Chauvel, 2005) mengindikasikan bahwa perasaan berbeda atau rasa Nasionalisme yang berbeda sebenarnya berasal dari pertemuan-pertemuan dengan bangsa-bangsa di luar dirinya. Misalnya (Singh, 2008), pandangannya merujuk kepada Nasionalisme Papua terbentuk melalui perjumpaan dengan orang Belanda, Jepang di saat pendudukannya, dan juga pertemuan dengan orang Indonesia pada zaman itu. Namun, ia lebih menitikberatkan kepada peran *missionaris* asing, seperti Izaak Samuel Kijne sebagai sentralistik dari terbentuknya nasionalisme Papua.

Pada hal yang lain yang berbeda dikatakan oleh (Chauvel, 2005) mengatakan bahwa proses terbentuknya Nasionalisme Papua terjadi akibat proses *dual-colonialism* yang dilakukan oleh Belanda pada aras atas, dan Indonesia pada aras bawah. Menurutnya, persaingan lebih dominan terjadi di aras bawah oleh orang-orang Indonesia seperti Manado, Kei, Ambon, sangir sebelum perang pasifik dan juga selama tahun 1944 -1962 (Meteray, 2012). Berbeda dengan Chauvel, (Drooglever, 2010) meyakini bahwa Nasionalisme Papua dan Indonesia tidak selaras dikarenakan orang Papua tidak turut serta terlibat dalam pembentukan nasionalisme Indonesia terhadap warga Papua lainnya.

Sejatinya proses Nasionalisme Papua antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Kajian sejarah yang mengandung multitafsir menyiratkan pola-pola faktual yang terkandung di dalamnya. Proses Nasionalisme Papua seperti yang dikembangkan oleh (Chauvel, 2005; Singh, 2008, Drooglever 2009; Meteray, 2012) telah menjelaskan bahwa faktor-faktor terkait pertemuan antara orang papua dan non Papua menjadi penting dalam lahirnya nasionalisme Papua. Penulis meyakini bahwa konsep pembentukan nasionalisme atas dasar pertemuan ini. Namun, keyakinan penulis akan proses kesadaran nasionalisme papua dengan model yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya perlu untuk dipertanyakan keabsahannya.

Proses pembentukan nasionalisme Papua model ini apabila dikaitkan dengan pandangan (Chauvel, 2005; Singh, 2008) bahwa nasionalisme Papua telah terbentuk sebelum sejarah perang pasifik sebelum tahun 1944, bahwa perasaan berbeda muncul dari persaingan antara orang Papua dengan orang non-Papua, yang nantinya akan menjadi Indonesia. Secara rasional dapat dikaji bahwa saat itu belum ada sebuah negara Indonesia dan juga belum sepenuhnya Nasionalisme Indonesia tersemayem ke seluruh wilayah pelosok yang nantinya menjadi bagian dari Indonesia integral saat ini. Hal ini mengingatkan bahwa faktor *divide it empera* yang telah dilakukan oleh Belanda, dan belum tentu orang-orang non Papua (nantinya Indonesia) di wilayah Papua pada tahun itu melakukan persaingan dan mengakui bahwa mereka adalah produk Indonesia secara utuh.

Faktor yang berikut, apabila dikaitkan dengan konsep *imagined community* yang dalam kajiannya melihat konteks Nasionalisme Indonesia menurut Ben Anderson (Anderson, 1999), makakomunitas yang terbentuk dari sesuatu yang dibayangkan. Maksudnya ialah nasionalisme terbentuk dari sebuah sistem politik yang dibayangkan dalam sebuah kesatuan yang terbatas dan kekuasaan yang paling tinggi. Pada bayangan itulah komunitas tidak akan saling mengenal antar satu dengan lainnya namun dapat dipersatukan dalam bayangan tersebut. Bayangan tertinggi ini hanya terdapat dalam sejarah peradaban bersama, misalnya membayangkan bendera merah-putih dan burung garuda yang secara langsung dikenal sebagai bagian dari negara Indonesia.

Secara nyata entitas dan eksistensial dari burung garuda dan bendera merah putih sampai dengan tahun 1961 belum dikenal oleh orang Papua dan bukan merupakan bayangan bersama untuk membentuk sebuah komunitas seperti dikatakan oleh pandangan (Anderson, 1999). Wujud dari bendera bintang kejora telah dikenal sejak tahun 1961. (Hutubessy, 2016) menemukan fakta bahwa

bendera bintang kejora memiliki makna kultural yang mendalam yang berkaitan juga dengan sistem kepercayaan Koreri yang merupakan bagian dari mitos *cargo-cult* yang berkembang dalam tradisi suku bangsa melanesia. *Sampari* atau nama lain daribintang kejora merupakan cerita dari rakyat Biak yang berisi tentang sebuah nilai kedamaian atau janji kehidupan kekal. Mengingat akan nilai kesakralan, dewan *Nieuw Guinea Raad* mengakomodirlah nilai sakral tersebut ke dalam manifesto politik di tahun 1961 untuk mempersiapkan sebuah negara merdeka.

The "Morning Star Flag," which the Biak demonstrators were guarding, was officially raised next to the Dutch flag on December 1, 1961, less than a year before the United States and Australia brokered the deal that decided the fate of Netherland

Pandangan (Rutherford, 1999) ini menampilkan tendensi politik dalam kapitalisme geopolitik dunia yang berperan dalam situasi dan pergerakan yang ada dimasa itu. Namun, situasi demikian juga jelas menyiratkan bahwaperasaan berbeda juga sejatinya telah berkembang dengan sebuah bentuk kesakralan yang telah menjadi Nasionalisme bersama. Bentuk kesakralan yang telah terlanjur tersemai dalam bendera bintang kejora di masa itu, pada akhirnya digunakan sebagai modal perjuangan setelah bergabung dengan Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh tindakan pemaksaan melalui kekerasan fisik ketika berintegrasi dengan Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di tahun 1969 (Osborne, 2001).

Runtutan demi runtutan sejarah pengibaran bendera telah tergambar jelas sebagai bentuk upaya perlawanan yang dilakukan atas upaya dan perasaan berbeda ini. Peran Filep Karma yang melakukan aksi pengibaran bendera khususnya pada saat tragedi "Biak berdarah" mengungkapkan motivasinya untuk melakukan pemisahan diri akibat darinasionalisme yang berbeda (Karma, Biak Berdarah, 2015):

"Maka biarlah kami yang dianggap monyet ini mempunyai negara monyet sendiri, memiliki warga monyet, presiden monyet, tetapi mari kita berlomba dalam 10-15 tahun ke depan lebih sejahtera mana? Biarlah kalian yang manusia, berkulit lebih putih, berambut lurus, dan yang mulia. Kita yang dianggap monyet oleh kalian, tetapi dimata Tuhan kita semua sama"

Model Nasionalisme Papua yang ditemukan ini, merupakan model "Sakralitas-Nasionalisme Papua" (Hutubessy, 2016). Sakralitas-Nasionalisme merupakan paham yang terbentuk melalui cara dan rasa yang mendalam terhadap identitas yang berkembang dan dikembangkan dalam konteks mitologi, sejarah, agama, gaya hidup, pengalaman baik dan buruk yang menggerakkan individu dan kelompok masyarakat dalam memperjuangkan sesuatu yang dianggap benar untuk dilakukan dalam kehidupan orang Papua.

Fase pergerakan Sakralitas-Nasionalisme yang dimaksudkan dapat di lihat sebagai nilai-nilai yang bermakna secara langsung dalam kehidupan orang Papua yang diekspresikan dalam berbagai bentuk pergerakan yang dilakukan yang salah satunya disebabkan karena kekecewaan dan kekerasan terhadap orang Papua. Pada perkembangan selanjutnya, setelah bergabung dengan Indonesia, Nasionalisme Papua masih tetap sakral.

III. SIMPULAN

Spasial (ruang atau jarak) yang terjadi antara Jakarta (non-Papua) dan Papua mempengaruhi pola pikir seseorang untuk mengenal, membaaur dan menganggap Papua secara utuh. Mengapa demikian? Karena belum adanya ruang komunikasi yang berlangsung, atau dengan kata lain pembauran. Misalnya, penulis sering mendengar keluh kesah mahasiswa Papua di Yogyakarta dalam mencari tempat tinggal. Selanjutnya, kepentingan bersifat ekonomi politik membuat kolonisasi terus terjadi terhadap orang Papua. Misalnya orang Papua masih saja menganggap dirinya terjajah dengan pendekatan represif maupun rasial, sekalipun secara *de facto* dan *de jure* masih berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis berpandangan bahwa Indonesia saat ini, secara tidak langsung sedang menjajah Papua, atau dengan kata lain Papua merupakan daerah koloni Indonesia. Pembangunan yang merata di segala bidang saat ini perlu ditingkatkan khususnya untuk Papua, sehingga tidak ada lagi perang (perseteruan) antara pemerintah dan rakyat. Akhir dari tulisan ini, Sakralitas-Nasionalisme Papua tetap bertahan dalam sanubari orang Papua. Sakralitas-Nasionalisme bergerak atas dasar kesakralan dalam perjuangan terhadap nilai-nilai keadilan yang humanis. Nasionalisme model ini lebih dominan terbuka apabila pola-pola kekerasan ini tetap menjadi bagian dalam kehidupan orang yang merasa

memilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, D. G. (2000). *Cahaya Bintang Kejora*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Anderson, B. (1999). *Komunitas-Komunitas Imajiner : Renungan tentang asal-usul dan penyebaran Nasionalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Benny Giay dan Yafet Kambai. (2003). *Yosepha Alomang ; Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan*. Jayapura: Elsham Papyrus.
- Chauvel, R. (2005). *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaptation*. Washington: East-West Center.
- Drooglever, P. (2010). "Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri". Yogyakarta: Kanisius.
- Fanon, F. (1994). *A Dying Colonialism*. New York: Grove.
- Galtung, J. (1980). *The True World's: A Transnational Perspective*. New York: Free Press.
- Galtung, J. (2003). *Studi Perdamaian*. Jakarta: Pustaka Eureka.
- Galtung, J. (2003). *Studi Perdamaian*. Jakarta: Pustaka Eureka.
- Gurr, T. R. (2016). *Why Man Robbel*. New York: Routledge.
- Hutubessy, F. K. (2016). *Nasionalisme Eksternal dan Internal Papua*. Yogyakarta: Library Universitas Gadjah Mada.
- Jubi. (2013, Desember 17). *Korban Tragedi Biak Berdarah, Dibakar, Dimutilasi Dan Diperkosa Secara Brutal*. Dipetik Agustus 13, 2017, dari Tabloid Jubi.com: <http://tabloidjubi.com/16/2013/12/17/korban-tragedi-biak-berdarah-dibakar-dimutilasi-dan-diperkosa-secara-brutal/>
- Karma, F. (2014). *Seakan Kitorang Setengah Binatang*. Jayapura: Deiyai.
- Karma, F. (2015, Agustus 29). *Biak Berdarah*. (F. K. Hutubessy, Pewawancara)
- Meteray, B. (2012). *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Nonie Sharp, Markus Wonggor Kaisiepo. (1994). *The Morning Star in Papua Barat*. North carlton: Arena Publications.
- Osborne, R. (2001). *Kibaran sampari "Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM).
- Paharizal & Ismantoro Dwi Yuwono. (2016). *Freeport ; Fakta-fakta yang disembunyikan*. Yogyakarta: Narasi.
- Rumansara, E. (2015, Agustus 24). *Stereotype dan Stigma*. (F. K. Hutubessy, Pewawancara)
- Rutherford, D. (1999). *Waiting for the End in Biak: Violence, Order, and a Flag Raising*. Southeast Asia Program Publications at Cornell University , 41.
- Singh, B. (2008). *Papua Geopolitics and The quest for Nationhood*. New Jersey and London: Transaction Publisher.
- Suryawan, I. N. (2017). *Papua Versus Papua*. Yogyakarta: Labirin.
- Wonda, S. (2007). *Tenggelamnya Rumpun Melanesia ; Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat*. Jayapura: Deiyai.
- Yoman, S. S. (2007). *Pemusnahan Etnis Melanesia*. Jayapura: Cenderawasih Press.
- Yoman, S. S. (2015, Agustus 28). *Identitas Kultural*. (F. K. Hutubessy, Pewawancara)